



**PEMERINTAH KOTA
SURABAYA**

PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2024

KECAMATAN GAYUNGANSURABAYA

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Maksud dan Tujuan	4
1.2.1 Maksud	4
1.2.2 Tujuan	4
1.3 Landasan Hukum	4
1.3.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah	4
1.3.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran	6
1.4 Sistematika Penulisan	7
BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2023	8
2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Gayungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023	8
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	20
BAB IV PENUTUP	32

DAFTAR TABEL

Tabel T-C 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja KEc. Gayungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2023.....	9
Tabel T-C 3.1 Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Kec. Gayungan Tahun 2023.....	21

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah Nya sehingga Kecamatan Gayungan bisa menyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gayungan Tahun 2024.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Gayungan disusun untuk jangka waktu satu tahun dan mengacu pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kecamatan Gayungan Tahun 2021-2026 dan Rencana Kerja ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi semua pihak baik itu Pemerintahan Kecamatan Gayungan maupun seluruh masyarakat di wilayah Kecamatan Gayungan dalam upaya melaksanakan pembangunan pada Tahun 2025.

Terima Kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen renja, semoga dokumen bisa di jadikan penyusunan Rencana Perubahan Anggaran 2025.



Adus Tjahjono, S.STP, M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197908201998101001

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Penyusunan dokumen perencanaan tahunan di tingkat Perangkat Daerah pemerintah kabupaten/kota dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi kepala daerah melalui evaluasi kinerja serta penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah. Rancangan Akhir Rencana kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Rankhir Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan, dalam bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran.

Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Pasal 343 ayat 1 bahwa Perubahan RKPD dan Renja Perangkat Daerah dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:

1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.

Perubahan Renja Perangkat Daerah berperan penting untuk mendorong kinerja suatu Perangkat Daerah dalam memaksimalkan kegiatan dan sub kegiatan yang telah dirancang sebelumnya. Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah sampai dengan triwulan II, kondisi keuangan daerah serta kondisi lain yang menyebabkan perlunya dilakukan perubahan.

Prinsip – prinsip di dalam penyusunan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah dan mengacu pada RKPD;
2. Rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan di dalam Perubahan Renja Perangkat Daerah didasarkan atas pertimbangan – pertimbangan yang telah disepakati bersama dan mempertimbangkan pagu indikatif;
3. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Dokumen Perubahan Renja Perangkat Daerah pada dasarnya merupakan suatu proses pemikiran strategis untuk menyikapi isu-isu yang berkembang yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan mengimplementasikannya dalam program, kegiatan dan sub kegiatan Perangkat Daerah. Kualitas perubahan Renja Kecamatan Gayungan tahun 2024 sangat ditentukan oleh kualitas program, kegiatan dan sub kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga penyusunan Renja Perangkat Daerah sangat ditentukan oleh kemampuan Perangkat Daerah dalam menyusun, mengorganisasikan, mengimplementasikan, mengendalikan dan mengevaluasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Berdasarkan rancangan perubahan RKPD yang telah memperoleh persetujuan Kepala Daerah, Kepala Daerah menerbitkan surat edaran tentang pedoman penyusunan perubahan Renja Perangkat Daerah yang disampaikan kepada kepala Perangkat Daerah dengan lampiran rancangan perubahan RKPD. Kepala Perangkat Daerah menyempurnakan rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada surat edaran, rancangan perubahan RKPD dan hasil pengendalian pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada kepala BAPPEDA paling lambat 1 (satu) minggu setelah surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan bahwa penjabaran program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif, lokasi kegiatan serta sasaran penerima manfaat dalam setiap rancangan perubahan Renja Perangkat Daerah telah sesuai dengan yang dirumuskan dalam rancangan Perubahan RKPD.

Berdasarkan rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi, rancangan Perubahan RKPD disempurnakan menjadi Rancangan Akhir Perubahan RKPD. Rancangan akhir perubahan RKPD dijadikan sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang perubahan RKPD. Walikota menyampaikan rancangan Perkada tentang perubahan RKPD kepada Menteri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah dan kepada gubernur melalui kepala BAPPEDA untuk difasilitasi. Rancangan Perkada tentang Perubahan RKPD disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah guna memperoleh persetujuan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah disusun menjadi rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD. Penyusunan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah diselesaikan paling lambat 2 (dua) minggu setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah disampaikan kepada Kepala Daerah melalui kepala BAPPEDA untuk diverifikasi dengan tujuan memastikan rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah telah selaras dengan Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD.

BAPPEDA menyampaikan seluruh rancangan akhir Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah. Penetapan Renja Perangkat Daerah dengan Keputusan Kepala Daerah, paling lambat 1 (satu) bulan setelah Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD ditetapkan. Perubahan Renja Perangkat Daerah yang telah ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.

Peraturan Kepala Daerah tentang Perubahan RKPD dijadikan dasar penetapan Perubahan Renja Perangkat Daerah dan pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara. Kebijakan Umum Perubahan APBD serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara disampaikan pemerintah Daerah kepada DPRD untuk dibahas sebagai landasan penyusunan rancangan perubahan APBD. Dokumen Perubahan Renja Kecamatan Gayungan Tahun 2021 menjadi pedoman penyusunan rancangan Perubahan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) Kecamatan Kecamatan Gayungan Tahun 2024.

I.2 Maksud dan Tujuan

I.2.1 Maksud

Maksud disusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 adalah untuk mewujudkan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan karena adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas daerah, sehubungan dengan adanya kebijakan pemerintah pusat dan provinsi serta mewujudkan efisiensi alokasi berbagai sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan dan sub kegiatan.

I.2.2 Tujuan

Adapun tujuan disusunnya Perubahan Renja Tahun 2024 adalah untuk:

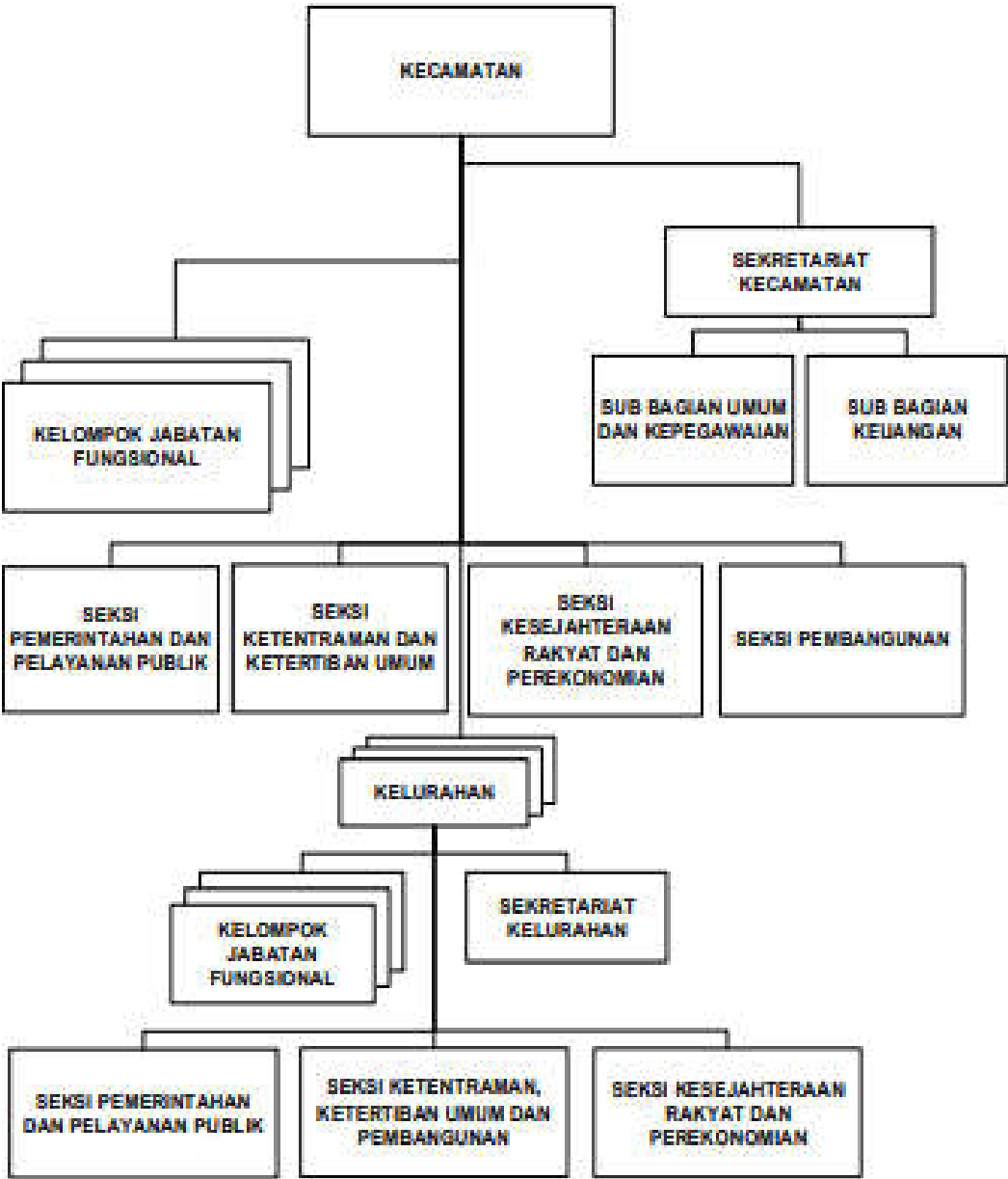
1. Memelihara konsistensi capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan output/keluaran dalam perencanaan dan penganggaran;
2. Mengukur kinerja Kecamatan Gayungan melalui capaian target kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun 2024;
3. Memberikan acuan bagi Kecamatan Gayungan sebagai Perangkat Daerah dalam melaksanakan program dan kegiatan pada sisa tahun anggaran 2024 dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk tercapainya tujuan dan sasaran;
4. Menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perubahan Anggaran Kecamatan Gayungan 2024;
5. Menyediakan informasi bagi pemenuhan laporan evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang perlu disampaikan kepada Pemerintah.

I.3 Landasan Hukum

I.3.1 Ketentuan tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) dan Kewenangan Perangkat Daerah

Tugas dan fungsi serta susunan organisasi Kecamatan Gayungan mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, yang dijabarkan dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Surabaya Nomor 2 Tahun 2020.



I.3.2 Ketentuan tentang Perencanaan dan Penganggaran

Peraturan-peraturan yang terkait dengan perencanaan dan penganggaran adalah sebagai berikut:

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Daerah Nomor : 4 Tahun 2021 tentang rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Surabaya tahun 2021-2026.
5. Peraturan Walikota Nomor 102 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Surabaya Nomor 94 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Surabaya.
6. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 52 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2025.

I.4 Sistematika Penulisan

Rancangan Perubahan Renja Kecamatan Gayungan Tahun 2024 ini disusun dengan sistematika yang disesuaikan dengan Permendagri 86 Tahun 2017 sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab I memuat/menjelaskan maksud, tujuan, dan dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah

BAB II EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Bab II memuat kompilasi hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun 2024 sampai dengan triwulan II

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bab III memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru / kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidaklangsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan

BAB IV PENUTUP

Bab IV memuat hal – hal yang dianggap perlu sesuai dengan kebutuhan

BAB II
EVALUASI RENJA SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

Pada Bab ini berisi mengenai evaluasi pelaksanaan Renja, dimana Renja Kecamatan Gayungan disusun bertujuan untuk mengidentifikasi kemampuan Kecamatan dalam melaksanakan program dan kegiatannya untuk mencapai Tujuan dan Sasaran yang ditetapkan pada Perubahan Renstra Perangkat Daerah. Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Gayungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebagaimana terlampir pada Tabel 2.1 dibawah ini :

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
				K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
										K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%								
7		Unsur Kewilayahan																					
7.01		Kecamatan																					
7.01.01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			18,148 ,133	23,224 ,855		21,296 ,542		4,747, 558		11,008 ,802		-		-		15,756 ,361		38,981 ,216		214,7 9%	
			Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariatan	99.65 %		94.78 %		98.81 %		95.23 %		95.85 %		-		-		95.85 %		95.85 %		96.19 %	
7.01.01.2.0 2		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			16,192 ,561			18,000 ,972		4,117, 619		9,580, 113		-		-		13,697 ,731		13,697 ,731		84.59 %	
			Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.0 0 %	
7.01.01.2.0 2.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN			9,120, 103			18.000 ,972		4.117. 619		9.580. 113		-		-		13.697 ,731		13.697 ,731		150,1 9%	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	N/A		N/A		66 Orang/bula n		64 Orang/bula n		64 Orang/bula n		-		-		64 Orang/bula n		64 Orang/bula n		N/A	
7.01.01.2.0 6		Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,807, 210			3,141, 518		611,8 90		1,389, 777		-		-		2,001, 667		2,001, 667		110.7 6%	
			Persentase barang dan jasa untuk menunjang	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100.0 0 %	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
							administrasi umum yang disediakan																						
7.01.01.2.0 6.0002						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,624,599				3.141.518		611.890		1.389.777		-		-			2.001.667		2.001.667		123,21%	
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		22 Paket		15 Paket		22 Paket			-		-			22 Paket		22 Paket		N/A	
7.01.01.2.0 9						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148,363				154,053		18,050		38,913		-		-			56,963		56,963		38.39%	
							Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %			-		-			100 %		100 %		100.00 %	
7.01.01.2.0 9.0010						Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139,792				154.053		18.050		38.913		-		-			56.963		56.963		40,75%	
							Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	N/A		N/A		5 Unit		5 Unit		5 Unit			-		-			5 Unit		5 Unit		N/A	
7.01.02						Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			2,625,461		45,229		39,769		2,714		20,304		-		-			23,018		68,247		2,60%	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
						K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3				5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %	0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %	
						Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %		100.00 %		100 %	100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %	
						Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.87 %		72.73 %		30.15 %	54.39 %		54.39 %		-		-		54.39 %		54.39 %		165.47 %	
7.01.02.2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan		6,699			1,650		1,650		1,650		-		-		3,300		3,300		49.26 %	
						Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga	6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		12 Lembaga		200.00 %	
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait		12,394			1.650		1.650		1.650		-		-		3.300		3.300		26,63 %	
						Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan	N/A		N/A		1 Laporan	1 Laporan		1 Laporan		-		-		1 Laporan		1 Laporan		N/A	

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																								
7.01.02.2.02						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			2,600,212			10,638		1,064		4,255		-		-			5,319		5,319		0.20 %				
						Jumlah lembaga kemasyarakatan yang aktif mendukung penyelenggaraa n urusan pemerintahan		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		197 Lembaga		-		-		197 Lembaga		197 Lembaga		100.00 %					
7.01.02.2.02.0003						Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan			4,708,920			10.638		1.064		4.255		-		-			5.319		5.319		0,11 %				
						Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan		N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A					
7.01.02.2.04						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada			18,550			27,481		0		14,399		-		-			14,399		14,399		77.62 %				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
					Camat																							
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %				
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100.00 %				
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100.00 %				
7.01.02.2.04.0003					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan		13,399			7.200		0		0		-		-		0		0		0,00 %				
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		N/A				
7.01.02.2.04.0002					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan		10,049			11.051		0		11.049		-		-		11.049		11.049		109,95%				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
						Nonperizinan																									
						Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A						
7.01.02.2.0 4.0001						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha		1,675			9.230		0		3.350		-		-		3.350		3.350		200,02%						
						Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A		N/A		48 Dokumen		12 Dokumen		24 Dokumen		-		-		24 Dokumen		24 Dokumen		N/A						
7.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan		12,540,404		9,664,185		13,556,136		560,368		6,802,998		-		-		7,363,366		17,027,551		135,78%					
						Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%						
						Persentase kelurahan yang menindaklanjuti konsep inovasi	100 %		37.50 %		62.50 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %						
7.01.03.2.0 2						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan		12,402,328			13,449,711		560,368		6,772,746		-		-		7,333,114		7,333,114		59.13%						
						jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 kelurahan		4 kelurahan		4 kelurahan		0 kelurahan		0 kelurahan		-		-		0 kelurahan		0 kelurahan		0.00 %						

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan						Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
													K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)						
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
						Jumlah kelurahan yang dikembangkan potensi wilayahnya	1 Kelurahan		1 Kelurahan		1 Kelurahan		0 Kelurahan		0 Kelurahan		-		-		0 Kelurahan		1 Kelurahan		100.00 %	
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833				3.259.013		0		1.236.811		-		-		1.236.811		1.236.811		41,96 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		9 Unit		0 Unit		7 Unit		-		-		7 Unit		7 Unit		N/A	
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833				2.713.291		106.669		2.163.825		-		-		2.270.494		2.270.494		77,02 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		9 Unit		-		-		9 Unit		9 Unit		N/A	
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833				1.869.857		0		1.327.574		-		-		1.327.574		1.327.574		45,04 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		8 Unit		0 Unit		4 Unit		-		-		4 Unit		4 Unit		N/A	
7.01.03.2.0 2.0002						Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947,833				1.894.065		36.126		999.649		-		-		1.035.775		1.035.775		35,14 %
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		6 Unit		0 Unit		3 Unit		-		-		3 Unit		3 Unit		N/A	
7.01.03.2.0 2.0003						Pemberdayaan Masyarakat di		986,245				668.769		88.160		220.747		-		-		308.907		308.907		31,32 %

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)			
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)								
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%			
						Kelurahan																							
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	N/A			
7.01.03.2.0 2.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245				1.172.491		119.473		299.601		-		-		419.075		419.075		42,49%			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	N/A			
7.01.03.2.0 2.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245				672.914		114.450		285.789		-		-		400.238		400.238		40,58%			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	N/A			
7.01.03.2.0 2.0003						Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		986,245				1.195.710		95.490		238.750		-		-		334.239		334.239		33,89%			
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-		-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas	N/A			
7.01.03.2.0 2.0001						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di		33,497				3.600		0		0		-		-		0		0		0,00%			

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
						Kelurahan																									
						Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	N/A		N/A		5 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		-		-		0 Lembaga Kemasyarakatan		0 Lembaga Kemasyarakatan		N/A						
7.01.03.2.03						Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan		138,076				106,425	0		30,253		-		-			30,253		30,253		21.91%					
						Jumlah Potensi Usaha yang difasilitasi	120 Lembaga		120 Lembaga		120 Lembaga		30 Lembaga		60 Lembaga		-		-		60 Lembaga		180 Lembaga		150.00%						
						Jumlah Lembaga yang sarana /prasarananya untuk Pemberdayaan dapat disediakan	30 Lembaga		30 Lembaga		30 Lembaga		0 Lembaga		30 Lembaga		-		-		30 Lembaga		30 Lembaga		100.00%						
7.01.03.2.03.0004						Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat		31,822				11.520	0		2.880		-		-			2.880		2.880		9,05%					
						Jumlah Laporan Fasilitas Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A						
7.01.03.2.03.0003						Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan		142,820				94.905	0		27.373		-		-			27.373		27.373		19,17%					
						Jumlah Sarana	N/A		N/A		30 Unit		0 Unit		30 Unit		-		-		30 Unit		30 Unit		N/A						

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan																								
7.01.04						Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			157,866		340,735		163,679		26,487		65,049		-		-			91,536		432,271		273,82%			
						Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-			100.00 %		100.00 %		100.00%				
7.01.04.2.01						Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			157,866				163,679		26,487		65,049		-		-			91,536		91,536		57.98%			
						Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		26 Lokasi		-		-			26 Lokasi		26 Lokasi		108.33 %				
7.01.04.2.01.0001						Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			309,309				163.679		26.487		65.049		-		-			91.536		91.536		29,59%			
						Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional		N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-			6 Laporan		6 Laporan		N/A				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
								K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
														K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)	K	Rp.(000)										
1	2	3					4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
							Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																								
7.01.05						Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum			39,379		7,639		11,002		1,073		2,146		-		-		3,219		10,858		27,57 %				
						Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan		100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00 %		100.00 %			
7.01.05.2.01						Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah			39,379				11,002		1,073		2,146		-		-		3,219		3,219		8.18 %				
						Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/diredam bersama Babinsa/Babinkamtibmas		45 Kasus		45 Kasus		45 Kasus		9 Kasus		21 Kasus		-		-		21 Kasus		66 Kasus		146.67 %					
						Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional		2 topik		2 topik		2 topik		0 topik		2 topik		-		-		2 topik		4 topik		200.00 %					
7.01.05.2.01.0002						Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan			16,749				3.851		0		0		-		-		0		0		0,00 %				

Kode	Sasaran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan					Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)	
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)
1	2	3					5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%	
					Nasional																					
					Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitas, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	N/A			N/A		230 Orang		0 Orang		40 Orang		-		-		40 Orang		40 Orang		N/A	
7.01.05.2.0 1.0005					Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan			8,039				7.151		1.073		2.146		-		-		3.219		3.219		40,04 %
					Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	N/A			N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A	

BAB III
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah. Program dilaksanakan dan dijabarkan dalam beberapa kegiatan dan sub kegiatan. Program Perangkat Daerah merupakan program-program RPJMD yang sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Faktor utama yang menjadi pertimbangan dalam penetapan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Gayungan Kota Surabaya adalah Visi dan Misi Kepala Daerah. Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan harus sejalan dan dapat mendukung tercapainya visi dan misi tersebut. Untuk mendukung pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan ada faktor yang sangat diperlukan yaitu pendanaan dan peraturan-peraturan yang mendukung tugas dan fungsi Kecamatan Gayungan Kota Surabaya. Untuk mewujudkan program, kegiatan dan sub kegiatan Kecamatan Gayungan Kota Surabaya didukung dari dana APBD Kota Surabaya Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Gayungan tahun 2024 mengacu pada Perubahan RKPD Kota Surabaya Tahun 2024 yang pada umumnya dapat berupa perubahan output kegiatan maupun sub kegiatan, target capaian kinerja serta kebutuhan dana/pagu indikatif. Perubahan Renja Kecamatan Gayungan Tahun 2024 dirumuskan dalam 5 program yaitu

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2. Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik
3. Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan
4. Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum
5. Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan pada Kecamatan Gayungan pada Rancangan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2024 tidak mengalami perubahan output maupun anggaran. Rancangan Perubahan Renja Gayungan tahun 2024 tetap akan melaksanakan 5 (lima) program, 10 (sepuluh) kegiatan dan 22 (dua puluh satu) sub kegiatan yang selengkapnya dapat dilihat pada tabel 3.1 berikut :

Tabel 2.1
Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Kec. Gayungan sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Kode	Sasa ran	Urusan / Program / Kegiatan / Subkegiatan				Indikator Kinerja Program (Outcome)/ Kegiatan (output)	Target Renstra PD pada Tahun 2026 (Akhir Periode RPJMD)		Realisasi Capaian Kinerja Renstra PD sampai dengan Renja PD Tahun Lalu 2023		Target Kinerja dan Anggaran Renja PD Tahun berjalan 2024 yang dievaluasi		Realisasi Kinerja Pada Triwulan								Realisasi Capaian Kinerja dan Anggaran Renja PD yang dievaluasi		Realisasi Kinerja dan Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024		Tingkat Capaian Kinerja Dan Realisasi Anggaran Renstra PD s/d tahun 2024 (%)					
							K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	I		II		III		IV		K	Rp. (000)	K	Rp. (000)	K	Rp. (000)				
													K	Rp.(00 0)	K	Rp.(000)	K	Rp.(0 00)	K	Rp.(0 00)										
1	2	3				4	5		6		7		8		9		10		11		12=8+9+10+11		13 = 6 + 12		14 = 13/5 x100%					
7		Unsur Wilayah																												
7.01			Kecamatan																											
7.01.01				Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota						18,14 8,133		23,22 4,855		21,29 6,542		4,74 7,55 8		11,00 8,802		-		-			15,75 6,361		38,98 1,216		214, 79%	
									Tingkat kepuasan pegawai terhadap pelayanan kesekretariat an	99.65 %		94.78 %		98.81 %		95.23 %		95.85 %		-		-		95.85 %		95.85 %		96.1 9%		
7.01.01.2. 02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						16,19 2,561		18,00 0,972		4,11 7,61 9		9,580 ,113		-		-			13,69 7,731		13,69 7,731		84.5 9%	
							Persentase ketepatan waktu pelayanan Gaji dan Tunjangan ASN				100 %		100 %		100 %		100 %		100 %		-		-		100 %		100 %		100. 00 %	
7.01.01.2. 02.0001							Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN						9,120 ,103		18.00 0.972		4.11 7.61 9		9.580 .113		-		-			13.69 7.731		13.69 7.731		150, 19%
							Jumlah Orang yang				N/A		N/A		66 Orang/b		64 Orang/b		64 Orang/b		-		-		64 Orang/b		64 Orang/b		N/A	

						Gaji dan Tunjangan ASN																		
7.01.01.2. 06					Administrasi Umum Perangkat Daerah			1,807 ,210			3,141 ,518		611, 890		1,389 ,777	-	-	-		2,001 ,667		2,001 ,667		110. 76%
						Persentase barang dan jasa untuk menunjang administrasi umum yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		-	-	-		100 %		100 %		100. 00 %	
7.01.01.2. 06.0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1,624 ,599			3.141 .518		611. 890		1.389 .777	-	-	-		2.001 .667		2.001 .667		123, 21%
						Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	N/A		N/A		22 Paket		15 Paket		22 Paket	-	-	-		22 Paket		22 Paket		N/A
7.01.01.2. 09					Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			148,3 63			154,0 53		18,0 50		38,91 3	-	-	-		56,96 3		56,96 3		38.3 9%
						Persentase Barang Milik Daerah penunjang urusan Pemerintah Daerah yang disediakan	100 %		100 %		100 %		100 %		100 %	-	-	-		100 %		100 %		100. 00 %
7.01.01.2. 09.0010					Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya			139,7 92			154.0 53		18.0 50		38.91 3	-	-	-		56.96 3		56.96 3		40,7 5%
						Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung	N/A		N/A		5 Unit		5 Unit		5 Unit	-	-	-		5 Unit		5 Unit		N/A

						Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dir ehabilitasi																				
7.01.02					Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik			2,625,461		45,229		39,769		2,714		20,304		-		-		23,018		68,247		2,60%
					Persentase jenis pelayanan yang dinilai baik oleh masyarakat	100 %		100.00 %		100 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %		
					Persentase data terverifikasi yang dibutuhkan Perangkat Daerah	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%		
					Persentase usulan musrenbang kecamatan yang dipertimbangkan	32.87 %		72.73 %		30.15 %		54.39 %		54.39 %		-		-		54.39 %		54.39 %		165.47%		
7.01.02.2.01					Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			6,699				1,650		1,650		1,650		-		-		3,300		3,300		49.26%
					Jumlah unsur lembaga yang hadir dalam kegiatan musrenbang pada tingkat kecamatan	6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		6 Lembaga		-		-		6 Lembaga		12 Lembaga		200.00 %
7.01.02.2.01.0001					Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan			12,394				1.650		1.650		1.650		-		-		3.300		3.300		26,63%

7.01.02.2.04					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			18,55 0			27,48 1		0		14,39 9		-		-			14,39 9		14,39 9		77.6 2%
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan non perizinan yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100. 00 %		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait kewenangan lain yang dilimpahkan kepada Camat	6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		-		-		6 Bidang Urusan		6 Bidang Urusan		100. 00 %		
					Jumlah Bidang urusan pemerintahan terkait pelayanan perizinan non usaha yang dilimpahkan kepada Camat	1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		-		-		1 Bidang Urusan		1 Bidang Urusan		100. 00 %		
7.01.02.2.04.0003					Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan			13,39 9			7.200		0		0		-		-		0		0		0,00 %	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	N/A		N/A		4 Laporan		1 Laporan		2 Laporan		-		-		2 Laporan		2 Laporan		N/A		

04.0002						Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Nonperizinan			9			1			9					9		9		95%			
							Jumlah Laporan Pelaksanaan Nonperizinan pada Urusan Pemerintahan	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-		-		6 Laporan		6 Laporan		N/A	
7.01.02.2.04.0001						Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha			1,675			9.230		0		3.350		-		-		3.350		3.350		200,02%	
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	N/A		N/A		48 Dokumen		12 Dokumen		24 Dokumen		-		-		24 Dokumen		24 Dokumen		N/A	
7.01.03						Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan			12,540,404		9,664,185		13,556,136		560,368		6,802,998		-		-		7,363,366		17,027,551		135,78%
							Persentase Potensi Usaha yang difasilitasi	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-		-		100.00 %		100.00 %		100.00%	
							Persentase kelurahan yang menindaklan juti konsep inovasi	100 %		37.50 %		62.50 %		0.00 %		0.00 %		-		-		0.00 %		0.00 %		0.00 %	
7.01.03.2.02						Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			12,402,328			13,449,711		560,368		6,772,746		-		-		7,333,114		7,333,114		59.13%	
							jumlah kelurahan yang melaksanakan musbangkel berdasarkan konsep inovasi	4 keluraha n		4 keluraha n		4 keluraha n		0 keluraha n		0 keluraha n		-		-		0 keluraha n		0 keluraha n		0.00 %	

						Jumlah kelurahan yang dikembangka n potensi wilayahnya	1 Keluraha n		1 Keluraha n		1 Keluraha n		0 Keluraha n		0 Keluraha n		-		-		0 Keluraha n		1 Keluraha n		100. 00 %	
7.01.03.2. 02.0002						Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947 ,833			3.259 .013	0		1.236 .811	-	-	-		1.236 .811		1.236 .811		1.236 .811		41,9 6%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		9 Unit		0 Unit		7 Unit	-	-	-		7 Unit		7 Unit		N/A		
7.01.03.2. 02.0002						Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947 ,833			2.713 .291	106. 669		2.163 .825	-	-	-		2.270 .494		2.270 .494		2.270 .494		77,0 2%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		2 Unit		0 Unit		9 Unit	-	-	-		9 Unit		9 Unit		N/A		
7.01.03.2. 02.0002						Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947 ,833			1.869 .857	0		1.327 .574	-	-	-		1.327 .574		1.327 .574		1.327 .574		45,0 4%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		8 Unit		0 Unit		4 Unit	-	-	-		4 Unit		4 Unit		N/A		
7.01.03.2. 02.0002						Pembanguna n Sarana dan Prasarana Kelurahan		2,947 ,833			1.894 .065	36.1 26		999.6 49	-	-	-		1.035 .775		1.035 .775		1.035 .775		35,1 4%	
						Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	N/A		N/A		6 Unit		0 Unit		3 Unit	-	-	-		3 Unit		3 Unit		N/A		

7.01.03.2. 02.0003						Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan			986,2 45			668.7 69		88.1 60		220.7 47	-	-	-		308.9 07		308.9 07		31,3 2%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A
7.01.03.2. 02.0003						Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan			986,2 45			1.172 .491		119. 473		299.6 01	-	-	-		419.0 75		419.0 75		42,4 9%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A
7.01.03.2. 02.0003						Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan			986,2 45			672.9 14		114. 450		285.7 89	-	-	-		400.2 38		400.2 38		40,5 8%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A
7.01.03.2. 02.0003						Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan			986,2 45			1.195 .710		95.4 90		238.7 50	-	-	-		334.2 39		334.2 39		33,8 9%
						Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksana n Pemberdayaa n Masyarakat di Kelurahan	N/A		N/A		2 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		-	-	-		0 Pokmas / Ormas		0 Pokmas / Ormas		N/A
7.01.03.2. 02.0001						Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah			33,49 7			3.600		0		0	-	-	-		0		0		0,00 %

						Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakan yang Disediakan																		
7.01.04					Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum			157,866		340,735		163,679		26,487		65,049	-	-	-		91,536		432,271	273,82%
					Persentase koordinasi penanganan pelanggaran Perda di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-	-	-	100.00 %		100.00 %		100.00%	
7.01.04.2.01					Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum			157,866				163,679		26,487		65,049	-	-	-		91,536		91,536	57.98%
					Objek yang berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat yang dipantau dan ditertibkan	24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		24 Lokasi		26 Lokasi		-	-	-	26 Lokasi		26 Lokasi		108.33 %	
7.01.04.2.01.0001					Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			309,309				163.679		26.487		65.049	-	-	-		91.536		91.536	29,59%
					Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia,	N/A		N/A		12 Laporan		3 Laporan		6 Laporan		-	-	-	6 Laporan		6 Laporan		N/A	

						Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
7.01.05					Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum		39,37 9		7,639		11,00 2		1,07 3		2,146	-	-	-		3,219		10,85 8		27,5 7%
					Persentase penanganan potensi konflik tidak menjadi konflik di Kecamatan	100 %		100.00 %		100 %		100.00 %		100.00 %		-	-	-	100.00 %		100.00 %		100. 00%	
7.01.05.2. 01					Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah		39,37 9				11,00 2		1,07 3		2,146	-	-	-		3,219		3,219		8.18 %
					Jumlah potensi konflik yang dapat ditangani/dire dam bersama Babinsa/Babi nkamtibmas	45 Kasus		45 Kasus		45 Kasus		9 Kasus		21 Kasus		-	-	-	21 Kasus		66 Kasus		146. 67 %	
					Jumlah topik fasilitasi, koordinasi dan pembinaan wawasan kebangsaan dan ketahanan nasional	2 topik		2 topik		2 topik		0 topik		2 topik		-	-	-	2 topik		4 topik		200. 00 %	
7.01.05.2. 01.0002					Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan		16,74 9				3.851		0		0	-	-	-		0		0		0,00 %

BAB V

PENUTUP

Renja Kecamatan Gayungan Tahun 2024 merupakan rencana pelaksanaan kegiatan Kecamatan Gayungan pada Tahun 2024 yang dalam penyusunannya mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan RKPD Tahun 2024. Dokumen Renja berdasarkan Perwali tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Surabaya Tahun 2024.

Renja Kecamatan Gayungan Tahun 2024 disusun melalui kaidah perencanaan strategis dan telah memperhatikan keselarasan dengan perencanaan di atasnya, untuk mewujudkan system perencanaan pembangunan yang terpadu dan optimal, sebagai perwujudan kinerja pemerintahan yang baik dan akuntabel sesuai tugas dan fungsinya.

Surabaya, 6 Agustus 2024


Agus Tjahjono, S.STP,M.Si
Pembina Tk. I
NIP. 197908201998101001
